



Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-
Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III,
Lt. 4Jl. Jend. Gatot
Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:
[@bksapdpri](https://twitter.com/bksapdpri)

Instagram:
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP_DPR_RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negaralain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut,
silakan menghubungi Biro
KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

DPR RI Mendorong Akses dan Penguatan Kesehatan Global yang inklusif

Jakarta - Rabu (10/8/2022), Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Vanda Sarundajang (F-PDIP), menghadiri *consultative workshop* yang diselenggarakan secara hybrid oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Parlemen Cambodia dan Parliamentary Centre of Asia (PCAsia), dengan tema "The Role of Parliaments in Promoting Inclusive and Sustainable Responses to Health Emergencies: Case Studies on Effectiveness and Impediments in National COVID-19 Responses".

Sebagai salah satu panelis dari workshop ini, Vanda Sarundajang menyampaikan di pembukaan presentasinya bahwa kesehatan mental dan fisik merupakan hak asasi manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas kesehatan rakyatnya, tanpa pembedaan apapun.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara tersebut juga menjabarkan pentingnya peran dan fungsi Parlemen dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan untuk memastikan seluruh program pemerintah terkait COVID-19, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), vaksin dan pelayanan medis bersifat inklusif dan tidak mengorbankan satu atau lebih dari pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

"Dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, akuntabilitas dan partisipasi di dalam aktivitas Parlemen, kita dapat melihat dan memastikan bahwa program-program terkait COVID-19 bermanfaat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk yang rentan dan tinggal di daerah terpencil," terangnya.

Dalam penutupannya, Vanda menyampaikan bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara lain untuk memperkuat sistem kesehatan global, termasuk melalui Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Sehubungan dengan ini, BKSAP DPR RI akan terus berperan aktif untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri.

Turut berpartisipasi dan berbagi informasi mengenai praktik terbaik dan juga tantangan-tantangan yang ada adalah: anggota parlemen dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, dan juga *Civil Society Organizations* (CSOs), yaitu Lokataru dan C4 Center.
